



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 04 Desember 2017

Halaman: 1

Pajak PJU Sisa Rp2,5 M per Bulan

■ Pemkot Yogyakarta Klaim Ada Efisiensi
Anggaran Penerangan Jalan Umum



Kami bisa menghemat rekening PJU dari PPJU sebesar Rp2,5 miliar per bulan.



YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengklaim mampu mengefisienkan rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) yang harus disetor ke Perusahaan Listrik Negara (PLN). Tidak tanggung-tanggung Pemkot mampu mengefisienkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) hingga hampir Rp2,5 miliar per bulan.

Pajak PJU

• Sambungan Hal 1

Dari data yang diperoleh Tribun Jogja, penerimaan PPJU di Kota Yogyakarta selalu memiliki sisa dari tahun ke tahun. Di tahun 2017 pada bulan Oktober ini penerimaan PPJU sudah mencapai Rp39,2 miliar. Sementara, rekening PJU mencapai Rp11,4 miliar, sehingga ada sisa PPJU mencapai Rp27,7 miliar.

Sementara itu, pada tahun 2016, PPJU mencapai Rp44,2 miliar dengan rekening PJU sebesar Rp13,2 miliar. Sehingga terdapat sisa PPJU sebesar Rp31 miliar. Di tahun 2015, PPJU yang diperoleh mencapai Rp41,3 miliar dengan rekening sebesar Rp14,5 miliar dan sisanya mencapai Rp26,8 miliar.

Pada tahun 2014, PPJU yang diterima mencapai Rp37,1 miliar; sementara rekening untuk PJU mencapai Rp10 miliar. Dengan demikian terdapat sisa PPJU sebesar Rp 26,3 miliar.

"Kami bisa menghemat rekening PJU dari PPJU sebesar Rp2,5 miliar per bulan. Kami memang berupaya untuk menghemat pembayaran, agar bisa digunakan untuk kepentingan pembiayaan yang lain dari pajak tersebut," ujar Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan PJU Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, Suko Darmanto,

Kamis (30/11).

Suko menjelaskan, PJU merupakan hal vital yang harus disediakan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bentuk layanan atas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dibayarkan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Menurutnya, pihaknya pun mengalihkan pembayaran PJU dari sistem pembayaran listrik kepada PLN secara lump-sum (borongan) menjadi KWH meter. Menurutnya, sistem pembayaran dengan KWH meter tersebut cenderung melampaui perkiraan konsumsi pemakaian listrik.

"Hal ini terjadi karena perhitungan biaya listrik didasarkan atas asumsi pemakaian tertentu, dengan tidak mempertimbangkan kondisi di lapangan apakah nyala atau mati, dan klasifikasi kelas daya listrik tertentu yang umumnya jauh lebih besar nilainya dibandingkan pemakaian daya listrik yang sesungguhnya," urainya.

PJU Hemat Energi
PPJ merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Penerangan Jalan. Dengan program PJU Hemat Energi yang dimulai sejak tahun 2000 pada PJU Protokol dengan Penataan PJU menggunakan KWH Meter dan lampu Hemat Energi, PAD Kota Yogyakarta dari

PPJ mengalami surplus.

Untuk itu, penataan PJU Hemat Energi dilanjutkan dengan meningkatkan pelayanan pada masyarakat yaitu Program Penataan Penerangan Jalan Umum Ditingkat RT-RW (PJU Lingkungan) dan PJU Kampung.

Meski demikian, pihaknya pun tetap menerima banyak keluhan dari masyarakat. Di antaranya banyak PJU yang tidak menyala, meskipun sudah diperbaiki beberapa kali. Hal ini, ujarnya dipengaruhi oleh beragam faktor, di antaranya adalah jaringan listrik liar dan juga faktor alam seperti adanya tikus dan lainnya.

"Kami sempat menertibkan ada bedeng (pencurian listrik) yang ada di PJU dekat PASTY (Pasty Pasar Satwa dan Tanaman Hias). Di situ, beberapa kali lampunya mati, namun setelah diketahui ada listrik liar, kami tertibkan," ujarnya.

Banyak juga di antaranya adalah faktor alam yang mengakibatkan PJU tersebut rusak atau tak menyala. Di antaranya, beberapa tiang PJU yang berada di kawasan dekat pohon, warung dan juga pasar rawan menjadi sarang tikus.

"Akibatnya, banyak PJU yang kemudian mati karena kabelnya digigit tikus. Ini unik tapi nyata dan kami hadapi di lapangan," paparnya.

Meski demikian, pihaknya tetap menjamin perbaikan dengan skala prioritas, yakni memperbaiki PJU yang masih dalam satu kawasan KWH. Perbaikan itu pun

dilaksanakan selama 2x24 jam sesuai warga melapor lewat telepon ataupun UPIK. Pihaknya pun menganggarkan perbaikan PJU senilai Rp 2 miliar per tahun.

"Anggaran ini untuk belanja material seperti lampu, tiang dan komponen lain," imbuhnya.

Terkendala personel

Di Kabupaten Bantul, perbaikan PJU yang mati dan rusak masih mengalami kendala karena keterbatasan personel dan sarana mobil tangga. Sehingga, masih ada beberapa titik yang belum bisa terlayani dengan maksimal.

Kepala Bidang Teknik, Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Cahya Widada menjelaskan, beberapa PJU yang mengalami kerusakan memang disebabkan beberapa faktor. Di antaranya karena daya listrik, sehingga menjadikan PJU mengalami mati hidup.

"Namun, kami berupaya memperbaiki meski dengan keterbatasan personel dan juga mobil tangga yang hanya satu," katanya.

Sejauh ini pihaknya pun menganggarkan millaran rupiah untuk penambahan sekitar 1.551 titik PJU baru di Bantul. Dengan rincian PJU dengan lampu LED sebanyak 553 titik dengan anggaran Rp9,09 miliar, konvensional 448 titik dengan anggaran Rp5,3 miliar dan PJU lingkungan 550 titik dengan anggaran Rp2,1 miliar. (sis)

Masih Banyak Jalanan Gelap

Di beberapa ruas jalan di Kota Yogyakarta, lampu penerangan jalan umum (LPJU) hanya berdiri seolah tanpa memiliki fungsi, lantaran mati dan tak kunjung diperbaiki. Padahal, perannya sangat vital hingga anggaran pengadaan dan perbaikannya mencapai miliaran rupiah.

Berdasarkan penelusuran Tribun Jogja, beberapa ruas jalan yang LPJU-nya mati berada di perbatasan antara Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, tepatnya di utara Jogja Expo Center (JEC), Banguntapan. Di ruas ini, ada beberapa LPJU yang tidak hidup, sehingga menyebabkan jalanan menjadi gelap.

● ke halaman 11

Masih Banyak

• Sambungan Hal 1

Berdasarkan data, anggaran untuk perbaikan LPJU ini cukup bervariasi. Di Kota Yogyakarta, dari sekitar 24.740 LPJU, anggaran untuk perbaikan dan juga pembelian material mencapai Rp1,2 miliar.

Sedangkan di Bantul, anggaran untuk perbaikan sekitar Rp200 juta setiap tahun. Anggaran tersebut untuk pengadaan sebanyak 3.537 LPJU.

"Ruas jalan di utara JEC menjadi agak gelap. Padahal, di sana adalah akses menuju kawasan wisata Kebun Binatang Gembira Loka dan arah menuju Kotagede," kata Novita, seorang wisatawan yang kerap menghabiskan waktu ke Yogyakarta, belum lama ini.

Selain sebagai fasilitas menuju tempat wisata dan pusat pemerintahan Kota Yogyakarta, LPJU tersebut tentunya juga dimungkinkan akan mengganggu akses lalu lintas di pusat pameran Yogyakarta tersebut. Novita yang merupakan warga Bekasi, Jawa Barat ini juga mengatakan, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan LPJU di kawasan wisata ini.

Tak hanya di perbatasan Kota Yogyakarta, LPJU mati juga dapat ditemui di kawasan Jalan Solo. Padahal jalur tersebut merupakan akses

menuju bandara serta Plaza Ambarukmo. Di Kawasan tersebut, LPJU mati di beberapa titik.

"Sangat penting segera diperbaiki, agar wisatawan tidak terganggu akses jalan. LPJU ini juga penting untuk keindahan tata Kota Yogyakarta," ulasnya.

Hal serupa disampaikan oleh Bagas, warga Pleret, yang mengeluhkan jalan di kawasan Imogiri Timur belum memiliki LPJU yang maksimal. Padahal, kawasan tersebut merupakan akses menuju kawasan wisata populer, yakni Makam Rajaraja, Kebun Buah Mangunan dan kawasan Hutan Pinus.

"Di Kawasan ini LPJU banyak yang belum menyala maksimal. Padahal, dengan akses menuju kawasan wisata, sudah seharusnya keberadaan LPJU diperhatikan," paparnya.

Keluhan online

Keluhan terkait LPJU ini juga disampaikan masyarakat melalui pesan singkat di Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Kota Yogyakarta. Layanan aduan secara online ini juga menjadi ajang warga Kota Yogyakarta untuk menyampaikan keluhan terkait dengan LPJU yang tidak hidup.

Sukanto, warga Gambiran, dalam keluhan yang disampaikan melalui UPIK mengatakan adanya LPJU kampung (LPJUK) yang tidak menyala sejak Ming-

gu (26/11) hingga Senin (27/11). Dia juga menyampaikan keluhan tersebut untuk segera ditindaklanjuti.

"Menginformasikan bahwa lampu PJUK di sepanjang Jalan Gambir Sawit, Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo, sejak Minggu hingga Senin malam mati. Mohon dinas terkait menindaklanjuti," keluhnya dalam layanan UPIK.

Namun, saat ditelusuri Tribun Jogja, LPJUK yang dimaksud dalam aduan tersebut sudah menyala lagi. Dari pantauan di lapangan, LPJUK ini memang cukup penting untuk warga sekitar. Selain untuk keamanan juga untuk keselamatan dalam berkendara. Pasalnya, lokasi yang dimaksud juga kawasan permukiman padat.

Selain LPJUK, warga Kota Yogyakarta juga meminta dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) untuk memperbaiki lampu hias antik di timur Jembatan Sardjito, Kecamatan Jetis.

"Perbaikan ini untuk menjaga keselamatan lingkungan," ungkap warga tersebut.

Untuk lampu hias, dari hasil pantauan di lapangan memang banyak yang sudah mati dan harus diperbaiki. Hal tersebut dapat dijumpai di kawasan Terminal Giwang-an, Kecamatan Umbulharjo. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005